p-ISSN: 2963-7856| e-ISSN: 2961-9890
Available online at jerkin.org/index.php/jerkin
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Volume 5 No. 2, Oktober - Desember 2026, pp 5822-5827

Sosialisasi Model Kolaborasi Pentahelix untuk Penguatan BUMDes di Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala

Erdiyansyah[1*], Fiki Ferianto[2], Muhammad Afandi[3], Harianto A. Lamading[4], Pricylia Chintya Dewi Buntuang[5], Muzakir Tawil[6], Imam Sofyan[7], Yulizar Pramudika Tawil[8]

[1-4, 6-8]Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, [5]Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, Palu
E-mail: erdiyansyahwahab@gmail.com
*Corresponding Author

https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i2.8150

ARTICLE INFO

Article history:
Received: 30 Okt 2026
Revised: 10 Nov 2026
Accepted: 28 Nov 2026

Kata Kunci:
BUMDes; kolaborasi pentahelix; tata kelola desa; pembangunan desa berkelanjutan; sosialisasi

Keywords:
Village-owned enterprises; penta-helix collaboration; village governance; sustainable rural development; socialization

ABSTRACT

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, belum berfungsi optimal sebagai penggerak ekonomi desa karena tata kelola kelembagaan yang lemah dan pengelolaan yang belum melibatkan pemangku kepentingan secara kolaboratif. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes dan aparatur pemerintahan tentang model kolaborasi pentahelix dalam pembangunan desa berkelanjutan. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan andragogis melalui tiga tahap, yaitu persiapan dan identifikasi kondisi mitra, sosialisasi yang dipadukan dengan diskusi berbasis kasus lokal, serta evaluasi menggunakan pretest dan posttest berisi sepuluh pernyataan dikotomis. Peserta berjumlah 20 orang yang terdiri atas pengelola BUMDes, unsur pemerintah kecamatan, dan perangkat desa. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa proporsi jawaban "mengetahui" meningkat dari 11,5% pada pretest menjadi 100% pada posttest. Kesenjangan pengetahuan awal terbesar terdapat pada dimensi kolaborasi multipihak (10%), tata kelola dan teknologi digital (10%), orientasi keberlanjutan (0%), serta kendala dan perencanaan kerja sama antarpihak (0%). Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi efektif membangun pemahaman bersama sebagai prasyarat awal kolaborasi, tetapi belum mengukur perubahan praktik kelembagaan. Oleh karena itu, pendampingan lanjutan dan evaluasi berbasis perilaku diperlukan untuk memastikan model kolaborasi diterapkan secara nyata.

Village-owned enterprises (BUMDes) in Sindue District, Donggala Regency, had not functioned optimally as drivers of the village economy because of weak institutional governance and limited collaboration with stakeholders. This community engagement program aimed to improve the understanding of BUMDes managers and local government officials regarding the penta-helix collaboration model for sustainable rural development. The program used a participatory and andragogical approach in three stages: preparation and identification of partner conditions, socialization combined with discussion of local cases, and evaluation using a pretest and posttest consisting of ten dichotomous statements. Twenty participants took part, comprising BUMDes managers, district government officials, and village officials. The proportion of "aware" responses increased from 11.5% in the pretest to 100% in the posttest. The largest initial knowledge gaps were found in multi-stakeholder collaboration (10%), governance and digital technology (10%), sustainability orientation (0%), and constraints and inter-party cooperation planning (0%). These findings indicated that the socialization was effective in building a shared understanding as an initial precondition for collaboration, although it did not yet measure changes in institutional practice. Further mentoring and behavior-based evaluation are therefore needed to ensure that the collaboration model is actually implemented.

This is an open access article under the CC–BY-SA license.

How to Cite: Erdiyansyah, et al. (2026), Sosialisasi Model Kolaborasi Pentahelix untuk Penguatan BUMDes di Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. 5(2) 5822-5827. https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i2.8150

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan desa sebagai subjek pembangunan yang berwenang mengelola potensi ekonominya sendiri. Salah satu instrumen utamanya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang kedudukannya sebagai badan hukum diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes diharapkan mengelola usaha, aset, dan layanan desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, dalam praktiknya, BUMDes menghadapi persoalan tata kelola yang berulang. Kapasitas staf yang terbatas menjadi hambatan utama dalam menyusun laporan keuangan dan anggaran yang akuntabel (Hapsari et al., 2020). BUMDes juga berada di antara dua logika kelembagaan, yaitu kesejahteraan sosial dan keberlanjutan komersial, sehingga akuntabilitas atas keadilan dan kinerja sering kali tidak jelas (Fitriani et al., 2024). Model tata kelola yang menekankan partisipasi dan legitimasi kelembagaan terbukti dapat memperkuat akuntabilitas serta mengurangi dominasi elite dalam pengelolaan BUMDes (Prabowo et al., 2025).

Persoalan tata kelola tersebut berkaitan erat dengan cara BUMDes berhubungan dengan aktor di luar dirinya. Literatur tata kelola kolaboratif menegaskan bahwa kolaborasi lintas aktor tidak terjadi dengan sendirinya. Kolaborasi memerlukan kondisi awal berupa kesadaran akan saling ketergantungan, pemahaman bersama, kepercayaan, dan forum dialog yang difasilitasi (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012). Dalam konteks pembangunan lokal di Indonesia, kerangka tersebut sering dioperasionalkan melalui model pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Studi pada BUMDes di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan bahwa model pentahelix baru berjalan baik di satu kecamatan, sedangkan keterlibatan pemangku kepentingan di wilayah lain umumnya terbatas pada fasilitasi dan pendanaan kegiatan bersama (Rosalia et al., 2023). Studi pengembangan desa wisata juga menemukan bahwa menjaga konsistensi keterlibatan para aktor merupakan hambatan utama kolaborasi pentahelix (Sumarna et al., 2025).

Kecamatan Sindue di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki potensi ekonomi pada sektor perikanan, pertanian, dan UMKM berbasis lokal. Berdasarkan observasi awal tim, pengelolaan BUMDes di wilayah ini masih bersifat parsial dan belum mengoptimalkan potensi tersebut. Kondisi mitra dapat dilihat dari hulu hingga hilir usaha. Pada sisi hulu, pemilihan unit usaha belum sepenuhnya didasarkan pada pemetaan potensi desa. Pada sisi proses, struktur organisasi belum jelas, standar operasional prosedur (SOP) belum tersedia, dan pencatatan keuangan belum tertata. Pada sisi hilir, produk dan layanan BUMDes masih dipasarkan secara terbatas di tingkat lokal dan belum memanfaatkan media digital. Di samping itu, BUMDes belum membangun kemitraan yang terstruktur dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, komunitas, maupun media. Dinamika ekonomi pascabencana di Sulawesi Tengah turut menuntut pengelolaan usaha desa yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Kajian pentahelix pada BUMDes umumnya menilai implementasi kolaborasi di tingkat kelembagaan, yaitu siapa yang terlibat dan bagaimana peran setiap aktor dijalankan (Rosalia et al., 2023). Perhatian terhadap kondisi awal kolaborasi, khususnya pemahaman pengelola BUMDes dan aparatur desa mengenai mengapa dan dengan siapa mereka perlu bekerja sama, masih relatif terbatas. Padahal, tanpa pemahaman bersama tersebut, upaya membangun forum dan kesepakatan kerja sama berisiko berhenti pada tataran seremonial. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini diarahkan pada tahap awal kolaborasi dengan dua bidang sasaran, yaitu bidang manajemen dan kelembagaan serta bidang produksi dan pemasaran. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes dan aparatur pemerintahan di Kecamatan Sindue mengenai model kolaborasi pentahelix, tata kelola yang transparan, pemanfaatan teknologi digital, dan orientasi pembangunan desa berkelanjutan, serta mengukur perubahan pemahaman tersebut melalui pretest dan posttest.

METODE

Waktu, tempat, dan peserta

Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2026 di desa Sumari Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Peserta berjumlah 20 orang yang ditentukan bersama mitra, terdiri atas pengelola BUMDes, unsur pemerintah kecamatan, dan perangkat desa. Pelibatan aparatur pemerintahan dimaksudkan agar unsur pemerintah sebagai salah satu aktor pentahelix turut membangun pemahaman yang sama dengan pengelola BUMDes.

Pendekatan kegiatan

Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan andragogis. Peserta merupakan orang dewasa yang belajar secara efektif apabila materi berangkat dari masalah nyata, memanfaatkan pengalaman mereka, dan dapat segera diterapkan (Knowles, 1980). Karena itu, setiap materi dikaitkan dengan kasus BUMDes setempat dan diikuti diskusi terbuka.

Prosedur pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam tiga tahap berikut.

1. Tahap persiapan, meliputi observasi awal dan wawancara dengan pengelola BUMDes untuk memetakan kondisi kelembagaan dan usaha, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, penyusunan materi, serta penyusunan instrumen evaluasi.
2. Tahap pelaksanaan, diawali pengisian pretest, kemudian penyampaian materi dalam lima dimensi: (a) fungsi dasar BUMDes dan pengelolaan berbasis potensi lokal; (b) kolaborasi multipihak dan pemetaan pemangku kepentingan dengan model pentahelix; (c) tata kelola yang transparan dan pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran; (d) orientasi pembangunan desa berkelanjutan; serta (e) kendala usaha dan langkah menyusun rencana kerja sama antarpihak. Materi bidang manajemen dan kelembagaan disampaikan oleh ketua dan anggota tim bidang manajemen, sedangkan materi bidang pemasaran disampaikan oleh anggota tim bidang pemasaran. Setiap sesi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab berbasis kasus lokal.
3. Tahap evaluasi, berupa pengisian posttest setelah seluruh materi disampaikan dan refleksi bersama peserta tentang tindak lanjut yang dapat dilakukan.

Dua mahasiswa dilibatkan untuk membantu pengumpulan data lapangan, administrasi pretest-posttest, dan dokumentasi kegiatan.

Instrumen dan analisis data

Instrumen evaluasi berupa kuesioner berisi sepuluh pernyataan yang disusun tim berdasarkan lima dimensi materi. Setiap pernyataan dijawab dengan pilihan "Ya" (mengetahui) atau "Tidak" (tidak mengetahui). Instrumen yang sama diberikan sebelum dan sesudah sosialisasi. Data dianalisis secara deskriptif dengan menghitung frekuensi dan persentase jawaban "Ya" pada setiap butir dan setiap dimensi, kemudian menghitung selisih persentase antara posttest dan pretest. Keberhasilan kegiatan ditetapkan apabila terjadi peningkatan pemahaman minimal 70%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan diawali dengan pembukaan bersama unsur pemerintah kecamatan, dilanjutkan pengisian pretest, penyampaian materi oleh tim, diskusi, dan pengisian posttest. Peserta aktif mengajukan pertanyaan, terutama mengenai cara menjalin kerja sama dengan pihak di luar desa dan cara memasarkan produk desa melalui media digital. Dokumentasi kegiatan disajikan pada Gambar 1.



(a)



(b)

Copyright © 2026, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)



(c)



(d)

Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan: (a) Tim Pengabdi bersama Peserta; (b) Penyampaian Materi; (c) Diskusi dan Tanya Jawab; (d) Pengisian Instrumen Evaluasi

Hasil pretest dan posttest

Perbandingan jawaban peserta sebelum dan sesudah sosialisasi pada setiap indikator disajikan pada Tabel 1. Pada pretest, hanya 23 dari 200 jawaban (11,5%) yang menyatakan "Ya". Pada posttest, seluruh peserta menjawab "Ya" pada semua indikator.

Tabel 1. Hasil Pretest dan Posttest Pemahaman Peserta (n = 20)

No	Indikator Pengetahuan	Pretest		Posttest	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Tujuan utama BUMDes adalah mengelola potensi ekonomi desa secara kolektif untuk kesejahteraan warga	11	9	20	0
2.	Pentingnya kerja sama dengan pemerintah desa, pelaku UMKM, dan masyarakat dalam menjalankan usaha	2	18	20	0
3.	Model kolaborasi multipihak (pentahelix) untuk memperkuat usaha desa	2	18	20	0
4.	Pemangku kepentingan yang dapat diajak bekerja sama mengembangkan usaha desa	2	18	20	0
5.	Pengelolaan usaha sebaiknya mengikuti potensi desa sendiri, bukan meniru desa lain	2	18	20	0
6.	Pentingnya transparansi keuangan dan tata kelola yang baik agar dipercaya masyarakat	1	19	20	0
7.	Cara memanfaatkan media sosial atau teknologi digital untuk memasarkan produk desa	3	17	20	0
8.	Pembangunan desa berkelanjutan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjaga lingkungan dan kepentingan warga	0	20	20	0
9.	Kendala umum (modal, pasar, kemampuan manajemen) dapat diatasi melalui kerja sama	0	20	20	0
10.	Langkah-langkah menyusun rencana kerja sama antarpihak untuk memajukan perekonomian desa	0	20	20	0
	Jumlah (persentase)	**23 (11,5%)**	**177 (88,5%)**	**200 (100%)**	**0 (0%)**

Untuk memudahkan interpretasi, kesepuluh indikator dikelompokkan ke dalam lima dimensi materi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pemahaman Peserta per Dimensi Materi

Dimensi (Nomor Indikator)	Jumlah Jawaban	Pretest "Ya" (%)	Posttest "Ya" (%)	Kenaikan (Poin %)
Fungsi dasar dan potensi lokal (1, 5)	40	32,5	100	67,5
Kolaborasi multipihak (2, 3, 4)	60	10,0	100	90,0
Tata kelola dan teknologi digital (6, 7)	40	10,0	100	90,0
Pembangunan berkelanjutan (8)	20	0,0	100	100,0
Kendala dan perencanaan kerja sama (9, 10)	40	0,0	100	100,0
Keseluruhan (1–10)	200	11,5	100	88,5

Pembahasan

Dimensi fungsi dasar dan potensi lokal memiliki pemahaman awal tertinggi (32,5%). Nilai ini terutama berasal dari indikator 1, yaitu 11 dari 20 peserta telah mengetahui bahwa BUMDes bertujuan mengelola potensi ekonomi desa secara kolektif. Sebaliknya, hanya 2 peserta yang memahami bahwa unit usaha sebaiknya dikembangkan sesuai potensi desa sendiri dan tidak meniru desa lain (indikator 5). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa peserta memahami tujuan normatif BUMDes, tetapi belum menerjemahkannya ke dalam keputusan memilih unit usaha. Temuan ini konsisten dengan kondisi hulu mitra, yakni pemilihan unit usaha yang belum didasarkan pada pemetaan potensi desa.

Dimensi kolaborasi multipihak, yang menjadi inti kegiatan, hanya dipahami oleh 10% jawaban pada pretest. Hanya 2 peserta yang mengetahui pentingnya bekerja sama dengan pemerintah desa, pelaku UMKM, dan masyarakat, model pentahelix, serta pemangku kepentingan yang dapat diajak bekerja sama. Rendahnya pemahaman ini sejalan dengan temuan Rosalia et al. (2023) bahwa keterlibatan aktor pentahelix dalam pengelolaan BUMDes umumnya masih terbatas. Dalam kerangka tata kelola kolaboratif, pemahaman bersama mengenai saling ketergantungan dan aktor yang perlu dilibatkan merupakan kondisi awal sebelum terbangunnya kepercayaan, komitmen, dan forum dialog (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012). Kenaikan menjadi 100% pada posttest menunjukkan bahwa kondisi awal tersebut mulai terbentuk. Namun, temuan Sumarna et al. (2025) mengingatkan bahwa tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi keterlibatan para aktor setelah kegiatan berakhir.

Pada dimensi tata kelola dan teknologi digital, hanya 1 peserta yang memahami pentingnya transparansi keuangan agar BUMDes dipercaya masyarakat (indikator 6), dan hanya 3 peserta yang mengetahui cara memanfaatkan media sosial untuk pemasaran (indikator 7). Rendahnya pemahaman tentang transparansi relevan dengan temuan bahwa keterbatasan kapasitas pengelola merupakan hambatan utama akuntabilitas BUMDes (Hapsari et al., 2020) dan bahwa partisipasi warga dapat memperkuat legitimasi kelembagaan BUMDes (Prabowo et al., 2025). Dimensi ini menghubungkan dua bidang sasaran kegiatan, yaitu kelembagaan pada sisi proses dan pemasaran pada sisi hilir.

Kesenjangan terbesar terdapat pada dimensi pembangunan berkelanjutan serta kendala dan perencanaan kerja sama. Tidak satu pun peserta yang mengetahui bahwa pembangunan desa berkelanjutan juga menyangkut kelestarian lingkungan dan kepentingan warga (indikator 8), bahwa kendala modal, pasar, dan manajemen dapat diatasi melalui kerja sama (indikator 9), serta langkah menyusun rencana kerja sama antarpihak (indikator 10). Temuan pada indikator 8 dapat dipahami melalui ketegangan antara logika kesejahteraan sosial dan logika komersial dalam BUMDes (Fitriani et al., 2024). Selama BUMDes dipersepsikan semata sebagai unit pencari keuntungan, dimensi sosial dan lingkungan cenderung terabaikan. Setelah sosialisasi, seluruh peserta menyatakan memahami ketiga aspek tersebut.

Secara keseluruhan, pemahaman peserta meningkat 88,5 poin persentase, sehingga melampaui target peningkatan minimal 70%. Pendekatan andragogis yang mengaitkan materi dengan kasus BUMDes setempat diduga turut mendukung capaian tersebut (Knowles, 1980). Keterlibatan unsur pemerintah kecamatan dan perangkat desa sebagai peserta juga penting, karena kolaborasi pentahelix memerlukan pemahaman yang sama di antara aktor, bukan hanya di pihak pengelola BUMDes.

Hasil ini perlu ditafsirkan dengan hati-hati. *Pertama*, instrumen menggunakan jawaban dikotomis yang bersifat swalapor (*self-report*), sehingga mengukur persepsi peserta bahwa dirinya mengetahui, bukan pengetahuan yang diuji kebenarannya. *Kedua*, skor posttest yang mencapai 100% pada seluruh

Copyright © 2026, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

indikator menunjukkan efek plafon (*ceiling effect*), sehingga perbedaan tingkat pemahaman antarpeserta tidak dapat diidentifikasi. *Ketiga*, posttest dilakukan segera setelah kegiatan tanpa kelompok pembanding, sehingga yang terukur adalah peningkatan pengetahuan jangka pendek, bukan perubahan praktik kelembagaan BUMDes. Kegiatan berikutnya perlu menggunakan skala bertingkat atau tes dengan kunci jawaban, pengukuran tindak lanjut beberapa minggu setelah kegiatan, serta indikator perilaku seperti tersusunnya rencana aksi kolaboratif dan kesepakatan kerja sama dengan mitra eksternal.

SIMPULAN

Sosialisasi model kolaborasi pentahelix di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, telah meningkatkan pemahaman 20 peserta dari unsur pengelola BUMDes, pemerintah kecamatan, dan perangkat desa. Proporsi jawaban "mengetahui" meningkat dari 11,5% menjadi 100%, dengan kesenjangan awal terbesar pada dimensi kolaborasi multipihak, tata kelola dan teknologi digital, orientasi keberlanjutan, serta perencanaan kerja sama antarpihak. Capaian ini menandai terbentuknya pemahaman bersama sebagai kondisi awal kolaborasi, tetapi belum membuktikan bahwa kolaborasi telah berjalan. Oleh karena itu, pengelola BUMDes dan pemerintah desa perlu menindaklanjuti kegiatan ini dengan memetakan pemangku kepentingan, menyusun rencana aksi kolaboratif, dan menerapkan pencatatan keuangan yang transparan. Pemerintah kecamatan disarankan memfasilitasi forum kolaborasi rutin antara BUMDes, pelaku usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan media. Kegiatan pengabdian berikutnya perlu dilengkapi dengan pendampingan lanjutan dan evaluasi berbasis perilaku.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdi menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako yang telah mendanai kegiatan ini melalui Dana DIPA BLU Tahun Anggaran 2026, kepada Pemerintah Kecamatan Sindue, pemerintah desa, dan para pengelola BUMDes di Desa Sumari Kecamatan Sindue atas partisipasinya, serta kepada Aulia Ramadhani dan Azsurah Zahra Naura atas bantuannya selama pelaksanaan kegiatan.

REFERENSI

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Fitriani, D., Shahbudin, A. S. M., & Shauki, E. R. (2024). Exploring BUMDES accountability: Balancing expectations and reality. Cogent Business & Management, 11(1), 2402083. https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2402083

Hapsari, A. N. S., Utami, I., & Kean, Y. W. (2020). Accountability in governance: Will and can traditional village-owned enterprises achieve it? The Indonesian Accounting Review, 10(2), 215–222. https://doi.org/10.14414/tiar.v10i2.2165

Knowles, M. S. (1980). The modern practice of adult education: From pedagogy to andragogy (Rev. ed.). Cambridge Adult Education.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Prabowo, C., Pelupessy, I. H., & Saputra, A. (2025). A cooperative-based village-owned enterprise (BUMDes) governance model to achieve Sustainable Development Goals (SDGs). Management Analysis Journal, 14(4), 417–424. https://doi.org/10.15294/maj.v14i4.34419

Rosalia, F., Makhya, S., & Budiono, P. (2023). Implementation of the pentahelix model in the development of village-owned enterprises (BumDes) in South Lampung Regency. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 13(2), 200–210. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i2.3660

Sumarna, E., Geohansa, A., Kania, I., Akbar, G. G., & Ulumudin, A. (2025). The penta helix model in tourism village development: A case study of Samida, Garut Regency. Ilomata International Journal of Social Science, 6(2), 748–761. https://doi.org/10.61194/ijss.v6i2.1683

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.